

PEMBANGUNAN PERTANIAN DI WILAYAH KEPULAUAN PROVINSI MALUKU

A. Marasabessy

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku

PENDAHULUAN

Berbagai teori pembangunan maupun pengalaman praktis di berbagai negara telah membuktikan kemampuan pertanian sebagai suatu sektor ekonomi strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Simon kuznet pada tahun 1961 telah mengemukakan sektor pertanian memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara, yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan pangan bagi seluruh penduduk, sebagai pasar yang besar bagi barang-barang produksi dan konsumsi, penciptaan kesempatan kerja dan sekaligus pemasok tenaga kerja dan penghasil devisa.

Walaupun bukti-bukti empiris menunjukkan peran sektor pertanian terhadap ekonomi nasional maupun daerah sangat penting, tetapi jika ditelaah lebih lanjut, ternyata para pelaku usaha pertanian atau masyarakat pertanian tidak secara proporsional dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat tersebut sesuai sumbangan yang diberikannya. Berbagai data menunjukkan adanya ketimpangan antar sektor pertanian dengan sektor lainnya dan ketimpangan tersebut arahnya semakin melebar, yang dicirikan oleh pendapatan kapita petani yang rendah dan produktivitas tenaga kerja pertanian yang hanya sepertiga rata-rata nasional, proporsi penduduk miskin di pedesaan yang lebih besar, dan nilai tukar pertanian yang cukup menurun.

Untuk menerangkan fenomena tersebut, berbagai kalangan baik akademisi ataupun praktisi, merujuk pada beberapa karakteristik yang melekat pada sektor pertanian yaitu :

1. *Resource endowment* (sumberdaya yang dikuasai) petani sangat terbatas : lahan sempit, modal terbatas, pendidikan rendah, daya absorsi teknologi lemah, dan kemampuan memanfaatkan pasar secara sendiri-sendiri hampir tidak ada.
2. Melembaganya struktur ekonomi dualistic, ada petani kecil yang gurem dan usaha pertanian besar yang komersial, yang tidak ditopang oleh bentuk kerja sama kemitraan yang saling menguntungkan dan berkeadilan.
3. Para petani dengan usaha skala kecil terkonsentrasi pada kegiatan agronomi/budidaya untuk menghasilkan komoditas bahan mentah sedangkan proses agro industri dan proses hilir lainnya ditangani oleh lembaga ekonomi dengan struktur yang lepas atau tidak berakar pada pertanian, sehingga nilai tambah yang tercipta di sektor hilir tidak didistribusikan dengan baik (dalam bentuk harga yang wajar) ke tingkat usahatani.
4. Investasi di sektor pertanian budidaya mempunyai resiko ketidakpastian yang tinggi karena keragaannya sangat dipengaruhi iklim, mempunyai *gestation period* yang relatif panjang dan secara umum mempunyai *return on investment* yang rendah. Sementara itu, kebijakan ekonomi makro tidak memperhatikan permasalahan tersebut, sehingga kebijakan insentif investasi di sektor pertanian diperlakukan sama dengan sektor-sektor lainnya.

Seiring dengan diberlakukannya UU 22 tahun 1999 dan UU nomor 25 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU 32 dan 33 tahun 2004, maka setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mengidentifikasi dan menganalisis keunggulan komparatif wilayah, berupa potensi/kekuatan berbagai sumberdaya pembangunan (*factor internal*) dan peluang/kesempatan yang mendukung pelaksanaan pembangunan (*factor eksternal*). Keunggulan komparatif wilayah tersebut untuk selanjutnya dapat direncanakan secara terarah dan dikembangkan secara optimal, sehingga tercipta kegiatan kegiatan pembangunan yang mampu mempercepat pembangunan wilayah, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta sekaligus memberikan insentif ekonomi yang menguntungkan bagi kelompok pelaku ekonomi.

Di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan ditambah lagi adanya tragedi kemanusiaan, telah mengakibatkan sebagian besar masyarakat Maluku mengalami penderitaan dan permasalahan yang sangat kompleks. Pada kondisi seperti ini Pemerintah Daerah umumnya dan khususnya Dinas Pertanian harus lebih proaktif sekaligus mampu mengamati dan menata peluang masa depan yang lebih baik.

Provinsi Maluku memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup berlimpah, tetapi belum dapat dimanfaatkan dengan baik dan optimal. Adapula potensi pembangunan yang sudah dimanfaatkan, namun pengembangannya masih sebatas kemampuan yang ada di daerah tersebut. Potensi yang akan dikaji disini yakni sektor pertanian. Karena sektor ini sangat potensial dan jika dikembangkan dengan baik dan tepat akan mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat di Provinsi Maluku.

Agar keunggulan komparatif wilayah Provinsi Maluku dapat dikelola secara efisien, efektif dan optimal serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, maka perlu adanya suatu intervensi program yang diharapkan dapat mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

POTENSI SUMBER DAYA PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN

A. Umum

1. Geografis

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka Provinsi Maluku secara astronomis terletak antara $2^{\circ} 30'' - 9^{\circ}$ Lintang Selatan dan $124^{\circ} - 136^{\circ}$ Bujur Timur dengan luas wilayah 581.376 km^2 yang terdiri dari : (a) Lautan 527.191 km^2 (90 %) dan (b) Daratan 54.185 km^2 (8 %).

Provinsi Maluku secara Geografis dibatasi oleh :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Maluku Utara
 - Sebelah Timur dengan Provinsi Irian Jaya
 - Sebelah Barat dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah
 - Sebelah Selatan dengan Negara Timor Leste dan Australia
- Provinsi Maluku terdiri dari 632 pulau besar dan kecil, pulau besar antara lain :
- P. Seram seluas $18.625 \text{ km}^2 \approx$ Provinsi Gorontalo
 - P. Buru seluas $9.000 \text{ km}^2 \approx$ 2/3 Provinsi Bali
 - P. Yamdena seluas $5.085 \text{ km}^2 \approx$ Negara Timor Leste
 - P. Wetar seluas 3.624 km^2

Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada peta terlampir

2. Iklim

Iklim di Kepulauan Maluku adalah iklim tropis dan iklim muson, iklim ini sangat dipengaruhi oleh lautan yang luas dan bervariasi antar tiap bagian wilayah rata-rata hujan tahun 1998 adalah 19.3 hari sedangkan penyinaran matahari rata-rata 52.2 hari dengan kelembaban nisbi rata-rata 85 %.

B. Khusus

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk di Provinsi Maluku tahun 2003 sebanyak 1.288.813 jiwa. Berdasarkan hasil sensus pertanian (BPS) tahun 2003 terdapat 295.919 jiwa rumah tangga pertanian. Perkembangan rumah tangga pertanian dengan luas pemilikannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Jiwa Rumah Tangga Pertanian Menurut Golongan Luas Lahan Yang Dikuasai

Golongan Luas Lahan	Tahun		Plus / Minus 2000 - 2003
	2000	2003	
0.5 - 0.75	23.158	21.516	- 1.642
0.76 - 1.0	32.572	45.347	+ 12.775
1.01 - 2	106.781	122.512	+ 15.731
> 2	138.042	142.871	+ 4.829

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2003

2. Sumber Daya Alam

Potensi Sumber daya lahan per kabupaten/kota untuk pengembangan komoditas tanaman pangan, perkebunan dan peternakan adalah sebagai berikut (Tabel 2).

Tabel 2. Potensi Lahan Untuk pengembangan komoditas sektor pertanian di Provinsi Maluku (dalam Ha)

Penggunaan Lahan	Kota Ambon	Malteng	Buru	Malra	MTB	SBT	SBB	ARU
Sub Sektor Pangan	1.436	118.809	46.985	4.264	185.687	133.841	46.000	347.705
Sub Sektor Hortikultura	2.038	11.426	4.173	2.590	1.246	4.350	3.483	-
Sub Sektor Perkebunan	872	170.500	40.148	62.019	433.066	359.447	93.835	235.337
Sub Sektor Peternakan *	-	138.470	361.770	111.884	250.304	13.593	25.196	13.083

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku (Data diolah)

* Animal Unit Ternak

3. Sumber Teknologi

Potensi sumber teknologi yang diharapkan atau mendukung pengembangan pembangunan pertanian di Provinsi Maluku relatif dapat dikatakan cukup memadai dengan adanya beberapa lembaga / institusi yang dianggap kompeten, seperti adanya 3 Perguruan Tinggi, 2 Lembaga Penelitian Daerah, dan 4 Balai Penelitian Pertanian Pusat yang semuanya ini diharapkan mampu menciptakan teknologi spesifik lokalita di setiap sub sektor.

Teknologi spesifik lokalita yang sangat mendesak dibutuhkan adalah teknologi benih dan bibit, teknologi pengolahan tanah, teknologi pemupukan dan pakan ternak, teknologi pengendalian OPT dan kesehatan hewan, teknologi panen dan pasca panen serta teknologi agroindustri. Sebagian besar teknologi tersebut cukup tersedia di tingkat lapangan.

4. Kelembagaan Kelompok Tani

Jumlah kelompok tani di Provinsi Maluku tahun 2000 mengalami penurunan karena dampak dari kerusuhan dan perubahan institusi khususnya bidang penyuluhan. Kelas kelompok tani di Provinsi Maluku terpusat pada Kelas Pemula, selanjutnya kelompok tani dengan jumlah tingkat kelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Kelompok Tani dan Status Kelompok Tani Sub Sektor Pertanian di Provinsi Maluku Tahun 1999.

No	Kab / Kota	Kelas Kemampuan Kelompok				Jumlah	Anggota (orang)
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama		
I	Tanaman Pangan / Hortikultura						
1.	Malteng	375	20	4	-	399	9.975
2.	Buru	343	21	4	-	368	9.200
3.	Malra	183	3	8	-	194	4.850
4.	MTB	132	2	8	-	142	3.550
5.	Kota Ambon	67	5	3	-	75	2.025
	Jumlah	1.100	51	27	-	1.178	29.600
II	Peternakan						
1.	Malteng	146	27	-	-	173	4.325
2.	Buru	79	16	-	-	95	2.375
3.	Malra	28	-	-	-	28	700
4.	MTB	43	1	-	-	44	1.100
5.	Kota Ambon	11	1	-	-	12	300
	Jumlah	307	45	-	-	352	8.800
III	Perkebunan						
1.	Malteng	193	-	-	-	193	4.825
2.	Buru	117	-	-	-	117	2.925
3.	Malra	87	-	-	-	87	2.175
4.	MTB	132	-	-	-	132	3.300
5.	Kota Ambon	11	-	-	-	11	275
	Jumlah	540	-	-	-	540	13.500

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Tahun 2001

Untuk memacu perkembangan kelas kelompok tani telah tersedia tenaga penyuluh untuk setiap sub sektor sebanyak 791 orang, dengan rincian per sektor dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah PPS dan PPL Per Sub Sektor di Provinsi Maluku Tahun 2003

No	Sub Sektor	Kabupaten					Jumlah
		Malteng	Buru	Malra	MTB	Kota Ambon	
1.	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura						
	PPS	1	1	1	-	1	4
	PPL	143	80	34	8	32	297
2.	Peternakan						
	PPS	2	1	-	-	2	5
	PPL	34	15	5	1	5	60
3	Perkebunan						
	PPS	1	-	1	-	-	2
	PPL	54	42	12	8	11	127

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten / Kota

5. Kelembagaan Perekonomian

Jumlah koperasi di Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2003 tercatat 1.025 buah yang tersebar di 5 kabupaten/kota antara lain : kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 93 buah. Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 188 buah. Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 394 buah. Kabupaten Buru sebanyak 60 buah dan Kota Ambon sebanyak 290 buah.

Dengan adanya kondisi kelembagaan perekonomian dalam hal ini koperasi yang seperti tersebut di atas diharapkan dapat mampu berperan aktif dalam menunjang aktivitas usaha pertanian di pedesaan, sehingga para pelaku usaha dalam hal ini peteni/peternak terdorong untuk mengembangkan usaha taninya.

Pada tabel 6 terlihat jumlah kantor bank di Provinsi Maluku pada tahun 2003 sebanyak 45 buah yang tersebar di 5 Kabupaten/kota antar lain : kabupaten Maluku Tenggara Barat terdapat 2 kantor Bank Pemerintah dan 1 bank pembangunan daerah, Kabupaten Maluku Tenggara terdapat 4 kantor bank pemerintah dan 2 kantor bank pembangunan daerah. Kabupaten Maluku Tengah terdapat 6 kantor bank pemerintah, 1 kantor bank pembangunan daerah dan 1 kantor bank swasta. Kabupaten Buru terdapat 1 kantor bank pemerintah dan 1 kantor bank pembangunan daerah, sedangkan di kota ambon terdapat 1 kantor bank Indonesia 13 kantor bank pemerintah, 3 kantor bank pembangunan daerah, 7 kantor bank swasta dan 2 kantor bank perkreditan rakyat.

Dengan adanya kelembagaan perekonomian yang dalam hal ini unsur perbankan yang telah tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Maluku dan yang lebih khusus lagi telah berada pada wilayah-wilayah sentra produksi pertanian, maka kondisi ini diharapkan dapat membuka peluang pengembangan usaha pertanian yang berorientasi agribisnis khususnya pada wilayah-wilayah sentra produksi.

Untuk memacu pengembangan usaha pertanian yang berorientasi agribisnis di provinsi. Maluku maka diharapkan adanya kebijakan fiskal dan moneter yang spesifik lokasi yang mengarah kepada kelangsungan aktivitas usaha tani dari para pelaku usaha dalam hal ini petani/peternak.

Tabel 5. Perkembangan Koperasi/KUD Menurut Kabupaten/ Kota

No	Kabupaten / Kota	1998	1999	2000	2001
1.	MTB	-	-	-	93
2.	Maluku Tenggara *)	102	146	146	188
3.	Maluku Tengah *)	215	396	396	394
4.	Buru	-	-	-	60
5.	Ambon	194	250	250	290
Maluku		511	792	792	1025

Keterangan : * Termasuk Kabupaten SBB, SBT dan Kab Kepulauan Aru

6. Asosiasi

Potensi kelembagaan asosiasi yang diharapkan dapat mendukung pengembangan pembangunan pertanian di provinsi Maluku relatif dapat dikatakan cukup memadai, namun efektivitasnya belum optimal (Tabel 6). Untuk itu perlu didorong pengembangan asosiasi dan sekaligus pengefektivan asosiasi yang telah ada. Jumlah asosiasi yang terkait dalam pengembangan pembangunan pertanian di Provinsi Maluku antara lain : HKTI, KTNA, PPSKI, ISPI, APKI, APJMI, APPI, APCI, dan APKI. Kondisi asosiasi yang ada ini dapat dikatakan relatif tidak berfungsi sesuai yang diharapkan.

Tabel 6. Kantor Bank Per Wilayah Kerja Bank Indonesia Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Nama Bank	KP	KC	KCP	KK	Unit	KPK	Ket
1.	MTB	- BRI	-	-	-	-	2	-	-
		- BPDM	-	1	-	-	-	-	-
2.	Maluku Tenggara	- BRI	-	1	-	-	3	-	-
		- BPDM	-	2	-	-	-	-	-
3.	Maluku Tengah	- BRI	-	1	-	-	5	-	-
		- BPDM	-	1	-	-	-	-	-
		- Danamon	-	1	-	-	-	-	-
4.	Buru	- BRI	-	-	-	-	1	-	-
		- BPDM	-	1	-	-	-	-	-
5.	Ambon	- BI	1	-	-	-	-	-	-
		- Mandiri	-	2	-	-	-	-	-
		- BNI	-	1	-	1	-	-	-
		- BRI	-	1	1	-	6	-	-
		- BPDM	1	1	1	-	-	-	-
		- BTN	-	-	-	1	-	-	-
		- Artagraha	-	1	-	-	-	-	-
		- BCA	-	1	1	-	-	-	-
		- Danamon	-	1	-	-	-	-	-
		- BII	-	1	-	-	-	-	-
		- Lippo	-	1	-	-	1	-	-
		- Modern	1	-	-	-	-	1	-

7. Sarana dan Prasarana Pertanian

Alat dan mesin pertanian adalah merupakan bagian dari sarana produksi pertanian yang diperlukan dalam proses produksi, panen dan pasca panen. Peralatan tersebut dibutuhkan untuk memajukan usaha pertanian menjadi usaha yang efisien, produktif serta komersial.

Potensi sarana dan prasarana pertanian dalam mendukung pengembangan pembangunan pertanian di Provinsi Maluku pasca kerusuhan sosial relatif dapat dikatakan belum memadai dan mengalami penurunan. Kondisi ini akibat dampak dari kerusuhan dan perubahan kewenangan menyangkut penyerahan asset-aset dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi. Selanjutnya jumlah sarana dan prasarana pertanian di Provinsi Maluku dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Sarana Alsintan di Provinsi Maluku

No	Nama Alsintan	Jumlah Unit	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Kab. Maluku Tengah				
	a. Kecamatan Kairatu.				
	- RMU	1 Unit	1	-	-
	b. Kecamatan Seram Utara				
	- Power Traser Biasa	1 Unit	1	-	-
	- Hand Traktor	99 Unit	88	3	8
	- Drayer	13 Unit	4	-	8
	- RMU	13 Unit	13	-	-
	- Pompa Irigasi	42 Unit	9	-	33
2.	Mesin coper	1 Unit	1	-	-
	- Timbangan Elektrik	1 Unit	1	-	-
	Kabupaten Buru				
	- Power Traser Biasa	41 Unit	2	-	39
	- Power Traser Mobiling	1 Unit	1	-	-
	- Hand Traktor	26 Unit	8	-	18
	- Traktor Roda 4	2 Unit	-	-	2
	- Drayer	2 Unit	1	-	1
	- RMU	2 Unit	2	-	-
	- Pompa Irigasi	30 Unit	14	-	16
	- Mesin Tetas	5 Unit	5	-	-
	- Mesin Pencampur Pakan	2 Unit	2	-	-
	- Mesin Penggiling Pakan	2 Unit	2	-	-
	- Timbangan Duduk	1 Unit	1	-	-
	- Genset	1 Unit	1	-	-
	- Timbangan Elektrik	1 Unit	1	-	-
	- Coper	1 Unit	1	-	-
	- Kulkas	1 Unit	1	-	-
3.	Kabupaten Maluku Tenggara				
	- Power Traser Biasa	3 Unit	3	-	-
	- Hand Traktor	1 Unit	1	-	-
	- Mesin Tetas	6 Unit	6	-	-
	- Mesin Pencampur Pakan	1 Unit	1	-	-
	- Mesin Penggiling Pakan	1 Unit	1	-	-
	- Genset	1 Unit	1	-	-
	- Mesin Pendingin	1 Unit	1	-	-
4.	Kabupaten MTB				
	Power Traser Multiguna	2 Unit	2	-	-
5.	Kota Ambon				
	- Hand Traktor	2 Unit	1	-	1
	- Traktor Roda 4	1 Unit	1	-	-
	- Mesin Tetas	7 Unit	7	-	-
	- Genset	2 Unit	2	-	-
	- Mesin Pencampur Pakan	1 Unit	1	-	-
	- Mesin Penggiling Pakan	1 Unit	1	-	-
	- Kulkas	1 Unit	1	-	-

Sumber : Data terbaru hasil inventarisasi sarana Alsintan tahun 2003

PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI WILAYAH KEPULAUAN PROVINSI MALUKU

1. Peluang

- Peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan mengakibatkan tingginya tingkat permintaan komoditas pangan
- Potensi pasar lokal, regional dan ekspor cukup tersedia
- Semakin meningkatnya minat dan kemampuan investasi swasta untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan kegiatan agribisnis di kawasan timur Indonesia
- Semakin terbukanya wilayah dengan adanya transportasi baik transportasi darat, laut maupun udara, sehingga hal ini memberikan pengaruh positif bagi peningkatan efisiensi produksi, aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian
- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian yang cukup pesat
- Keunggulan komparatif wilayah provinsi Maluku untuk pengembangan sektor pertanian.

2. Tantangan

- Harga produk pertanian yang berlaku ditingkat petani sangat tidak menguntungkan (khusus komoditas tanaman pangan)
- Sumber daya manusia yang rendah sehingga berdampak terhadap akses informasi dan rendahnya adopsi teknologi dalam pengembangan pertanian
- Adanya standar kualitas produk pertanian di pasaran (terutama pasar internasional)
- Terbatasnya modal petani dan anggaran pemerintah dalam pengembangan pertanian
- Usaha pertanian masih bersifat usaha sampingan sehingga sumber daya yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS

A. VISI

Pembangunan pertanian dengan visinya yaitu : Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pengembangan sistem usahatani yang berbasis sumberdaya lokal yang berorientasi agribisnis dan berdaya saing.

B. MISI

Sedangkan misi dari pembangunan pertanian provinsi Maluku adalah :

- Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana penunjang pembangunan pertanian.
- Pengembangan sistem usaha tani melalui pendekatan gugus pulau
- Peningkatan produksi bahan pangan dalam jumlah yang cukup dan berkualitas sesuai karakteristik wilayah dan budaya lokal
- Pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian baik aparat maupun petani dalam rangka menunjang pelaksanaan sistem agribisnis
- Pengembangan penelitian teknologi spesifik lokasi dan rama lingkungan
- Pengembangan sub sistem yang terkait dengan sistem agribisnis untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi pembangunan pertanian mulai dari tataran Up stream, On Farm sampai Of Farm
- Pendayagunaan keragaman sumber daya alam dan hayati secara optimal dan berkelanjutan
- Pengembangan sistem informasi pertanian yang maju, moderen dan merata.

Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi pembangunan pertanian provinsi Maluku seperti tersebut di atas, maka perlu diberikan nilai-nilai dalam rangka mengawal visi dan misi tersebut yaitu :

- Bersih, bebas dari KKN, transparan, akuntabel, demokratis dan aspiratif
- Amanah dapat dipercaya
- Profesional dan kompetensi.

C. Isu-Issu Pembangunan Pertanian di Provinsi Maluku

Isu-Issu Pokok Agribisnis

1. Daya saing produk (harga, mutu)
2. Kontinuitas produksi
3. Pendayagunaan lahan
4. Teknologi
5. Modal
6. Pasca panen dan pengolahan
7. pasar
8. Lingkungan dan berkelanjutan

Isu-Issu Pokok Ketahanan Pangan

1. Ketersediaan pangan
2. Distribusi pangan
3. Diversifikasi pangan
4. Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan
5. Harga pangan
6. Konversi lahan
7. Antisipasi kekeringan
8. Kemiskinan

D. Penyesuaian Manajemen Pembangunan Pertanian

1. Manajemen pembangunan pertanian diletakkan sesuai dengan kewenangan berdasarkan UU No 22 tahun 1999 dan PP No 25 tahun 2000
2. Kewenangan diletakkan pada daerah otonom kabupaten /kota
3. Kewenangan provinsi mencakup kegiatan yang bersifat lintas kabupaten/kota
4. Kewenangan pemerintah pusat di bidang pertanian terbatas kepada pengaturan, penetapan standar, pedoman dan norma.

E. Program Pembangunan Pertanian

1. Program pengembangan agribisnis
2. Program peningkatan ketahanan pangan
3. Program peningkatan kesejahteraan petani

F. Strategi Pengembangan

1. Pengembangan kawasan agribisnis komoditas komersial dan pangan strategis
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Peningkatan kelembagaan layanan agribisnis
4. Dukungan infrastruktur
5. Kebijakan insentif (Subsidi, tarif, jaminan harga)

G. Fokus Program Pembangunan pertanian

1. **Fokus Wilayah :**
 - a. Pemantapan kawasan sentra pengembangan
 - b. Optimalisasi pendayagunaan lahan
 - c. Pengembangan daerah terpencil dan perbatasan
2. **Fokus Komoditi :**
 - a. Tanaman pangan : Padi, jagung, kedele, ubi kayu, kacang tanah dan komoditi pangan lokal
 - b. Hortikultura : Jeruk, mangga, kentang, bawang merah, dan buah-buahan unggulan lokal
 - c. Perkebunan : Kelapa, cengkeh, pala kakao, mete, dan panili
 - d. Peternakan : sapi potong, kambing, ayam buras dan itik serta ternak unggulan lokal (Kerbau Moa, Kambing Lakor dan Domba Kisar)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan potensi, peluang, tantangan serta isu-isu pokok yang ada dalam pengembangan pertanian di provinsi Maluku maka ada beberapa pokok pikiran yang merupakan rekomendasi yang perlu mendapat perhatian yaitu :

- a. Provinsi Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk pengembangan sektor pertanian namun pengembangannya belum optimal.
- b. Pengembangan sektor pertanian di provinsi Maluku telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana serta modal usaha dalam mendorong pengembangan sektor pertanian di provinsi Maluku.
- d. Rendahnya sumber daya manusia petani dan terbatasnya sumber daya petugas pertanian serta lemahnya peran kelembagaan pertanian dalam mendorong pengembangan sektor pertanian.

Saran

- a. Dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas pada wilayah pengembangan sentra produksi maka perlu diikuti dengan program pengembangan infra struktur penunjang.
- b. Untuk memenuhi ketersediaan pangan, bahan baku industri dan ekspor maka strategi kebijakan pengembangan sektor pertanian di provinsi Maluku di fokuskan pada wilayah-wilayah sentra pengembangan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah serta budaya masyarakat setempat.
- c. Perlu adanya dukungan dana yang cukup baik dari sumber APBN, APBD dan dana-dana bantuan lainnya.
- d. Peningkatan SDM petani dan petugas serta peningkatan peran kelembagaan dalam mendorong pengembangan sektor pertanian.
- e. Terkait dengan peningkatan pendapatan dan *bargaining position* petani maka perlu adanya kebijakan insentif (subsidi, tarif dan jaminan harga).

PENUTUP

Demikian makalah ini kami buat, kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penulisan makalah ini. Untuk itu diharapkan adanya saran dan kritikan yang konstruktif demi penyempurnaan, semoga apa yang kita pikirkan dan rencanakan pada hari ini akan mendapat rahmat dan bimbingan dari Tuhan yang Maha Kuasa dan semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesempatan untuk selalu mengabdikan dan menjalankan tugas-tugas kita ke depan.